BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Alasan penulis memilih judul" **KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENANGGAPI PROTES MALAYSIA TERKAIT MASALAH KABUT ASAP KE MALAYSIA** " sebagai judul adalah karena permasalahan ini sangat menarik untuk dijadikan bahan dan topik diskusi oleh semua kalangan baik secara formal maupun informal.

Selain itu penulis juga memiliki beberapa alasan lain diantaranya:

1. Problema kabut asap di Indonesia sudah lama terjadi, namun sampai sekarang pun tidak dapat teratasi dengan baik. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih jauh, dan apa yang membuat kesulitan itu muncul.
2. Kasus kebakaran hutan di Indonesia menyebabkan kabut asap yang berdampak ke negara tetangga khususnya Malaysia. Penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk protes Malaysia terhadap Indonesia terkait masalah kabut asap..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Alasan penulis memilih judul" KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENANGGAPI PROTES MALAYSIA TERKAIT MASALAH KABUT ASAP KE MALAYSIA " sebagai judul adalah karena permasalahan ini sangat menarik untuk dijadikan bahan dan topik diskusi oleh semua kalangan baik secara formal maupun informal.

Selain itu penulis juga memiliki beberapa alasan lain diantaranya:

1. Problema kabut asap di Indonesia sudah lama terjadi, namun sampai sekarang pun tidak dapat teratasi dengan baik. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih jauh, dan apa yang membuat kesulitan itu muncul.
2. Kasus kebakaran hutan di Indonesia menyebabkan kabut asap yang berdampak ke negara tetangga khususnya Malaysia. Penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk protes Malaysia terhadap Indonesia terkait masalah kabut asap..

B. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Menjawab pokok permasalahan dan sekaligus membuktikan hipotesa tentang penyebab kebakaran hutan di Indonesia yang menimbulkan kabut asap.
2. Mengetahui Kebijakan Indonesia menanggapi protes Malaysia terhadap masalah kabut asap.

C. Latar Belakang Masalah

Upaya perlindungan hutan dari bencana kebakaran yang menjadi tanggung jawab besar pemerintah, kembali mengalami kegagalan. Pada awal bulan Juli, asap yang timbul akibat kebakaran hutan sudah mulai kelihatan. Kebakaran mulai terjadi dan meluas dibeberapa daerah yang hampir setiap tahun mengalami bencana tersebut. Kejadian ini semakin parah pada bulan Agustus hingga bulan November lalu, sehingga menyita banyak perhatian[1].

Luas hutan Indonesia 120,35 juta hektar merupakan kelompok hutan tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brasil dan Zaire, mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyeimbang iklim global. Dalam tataran global,

[1] http://www.ditjenphka.go.id/karhut/kebakaran%20per%20vegetasi.pdf diakses pada tanggal 30

B. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Menjawab pokok permasalahan dan sekaligus membuktikan hipotesa tentang penyebab kebakaran hutan di Indonesia yang menimbulkan kabut asap.
2. Mengetahui Kebijakan Indonesia menanggapi protes Malaysia terhadap masalah kabut asap.

C. Latar Belakang Masalah

Upaya perlindungan hutan dari bencana kebakaran yang menjadi tanggung jawab besar pemerintah, kembali mengalami kegagalan. Pada awal bulan Juli, asap yang timbul akibat kebakaran hutan sudah mulai kelihatan. Kebakaran mulai terjadi dan meluas dibeberapa daerah yang hampir setiap tahun mengalami bencana tersebut. Kejadian ini semakin parah pada bulan Agustus hingga bulan November lalu, sehingga menyita banyak perhatian[1].

Luas hutan Indonesia 120.35 juta hektar merupakan kelompok hutan tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brasil dan Zaire, mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyeimbang iklim global. Dalam tataran global,

---

[1] [illegible]

keanekaragaman hayati Indonesia menduduki posisi kedua di dunia sehingga keberaadaannya perlu dipertahankan. Akan tetapi pemanfaatan hasil hutan kayu secara berlebihan dan besarnya perubahan kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan lingkungan, ekonomi dan sosial.[2]

Belakangan ini hutan menjadi perhatian Internasional sebagai isu lingkungan dan ekonomi. Hutan memberikan manfaat secara ekonomi maupun sosial yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Namun praktik pengelolaan hutan di Indonesia masih jauh dari pertimbangan kelestarian, dimana laju kerusakan hutan setiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan kebakaran lahan dan hutan yang hampir terjadi setiap tahun di Indonesia, khususnya dikepulauan Riau, sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan dan sering kali menyebabkan pencemaran asap lintas batas (*Transboundary haze pollution*) kewilayah negara tetangga. Khususnya Malaysia, seperti halnya yang terjadi pada bulan juni-juli 2004 lalu. Melihat kenyataan dilapangan, terbukti bahwa strategi yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah kebakaran hutan tidak memberikan informasi apa-apa.

---

[2] http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana/bakarhutan/060808_kblumhtn_cp/

keanekaragaman hayati Indonesia menduduki posisi kedua di dunia sehingga keberadaannya perlu dipertahankan. Akan tetapi pemanfaatan hasil hutan kayu secara berlebihan dan besarnya perubahan kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan lingkungan, ekonomi dan sosial.[2]

Belakangan ini hutan menjadi perhatian internasional sebagai isu lingkungan dan ekonomi. Hutan memberikan manfaat secara ekonomi maupun sosial yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Namun praktik pengelolaan hutan di Indonesia masih jauh dari pertimbangan kelestarian, dimana laju kerusakan hutan setiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan kebakaran lahan dan hutan yang hampir terjadi setiap tahun di Indonesia. Khususnya dikepulauan Riau, sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan dan sering kali menyebabkan pencemaran asap lintas batas (*Transboundary haze pollution*) kewilayah negara tetangga. Khususnya Malaysia, seperti halnya yang terjadi pada bulan juni-juli 2004 lalu. Melihat kenyataan dilapangan, terbukti bahwa strategi yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah kebakaran hutan tidak memberikan informasi apa-apa.

[2] http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana/bakarhutan/060808_kbkrhtn_sp/

Undang – undang dan instruksi presiden yang melarang masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan tidak mampu membantu pemerintah daerah dalam mempersuasi masyarakat dalam mencegah kebakaran. Bahkan sanksi tegas dari pihak kepolisian untuk para pelaku pembakaran hutan tidak membuat masyarakat takut.

Masyarakat yang menjadi tersangka dari kasus kebakaran hutan ini, tidak mengerti dan sadar akan dampak negatif yang timbul akibat bencana kebakaran tersebut. Mereka juga tidak mengetahui seberapa besar kerugian yang dialami negara setiap musim kemarau tiba. Sehingga metode pembakaran lahan yang menjadi budaya ladang berpindah serta *land clearing* bagi pengusaha daerah dan masyarakat pedesaan hingga kini masih dilakukan karena yang mereka ketahui bahwa pembakaran hutan dapat memberikan keuntungan bagi mereka, karena mereka tidak perlu mengeluarkan dana yang besar.

Setiap tahunnya, problema kabut asap selalu menjadi masalah nasional dan regional. Telah berulangkali seruan kebakaran hutan supaya diminimalisir, akan tetapi hasilnya tak kunjung membawa perubahan nyata, dan problema ini berulang dan berulang lagi. Dampak negatif dari kabut asap ini sangat berpengaruh pada kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Yakni hilangnya sejumlah mata pencaharian

Undang – undang dan Instruksi presiden yang melarang masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan tidak mampu membantu pencerintah daerah dalam mempersuasi masyarakat dalam menceegah kebakaran. Bahkan sanksi tegas dari pihak kepolisian untuk para pelaku pembakaran hutan tidak membuat masyarakat takut.

Masyarakat yang menjadi tersangka dari kasus kebakaran hutan ini, tidak mengerti dan sadar akan dampak negatif yang timbul akibat bencana kebakaran tersebut. Mereka juga tidak mengetahui sebenarpa besar kerugian yang ditanni negara setiap musim kemarau tiba. Sehingga metode pembakaran lahan yang menjadi budaya ladang berpindah serta /and clearing bagi pengusaha daerah dan masyarakat pedesaan hingga kini masih dilakukan karena yang mereka ketahui bahwa pembakaran hutan dapat memberikan keuntungan bagi mereka, karena mereka tidak perlu mengeluarkan dana yang besar.

Setiap tahunnya, problema kabut asap selalu menjadi masalah nasional dan regional. Telah berulangkali seruan kebakaran hutan supaya diminimalisir, akan tetapi hasilnya tak kunjung membawa perubahan nyata, dan problema ini berulang dan berulang lagi. Dampak negatif dari kabut asap ini sangat berpengaruh pada

masyarakat,terutama masyarakat disekitar hutan, kerena selama ini mata pencaharian mereka adalah berasal dari hasil hutan.Akibat dari asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan otomatis menghambat aktivitas sehari-hari yang secara otomatis mempengaruhi penghasilan,peningkatan jumlah asap yang sangat signifikan menjadi penyebab utama munculnya penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan.), menghambat tansportasi karena ketebalan kabut asap yang mengganggu jarak pandang. Disinilah diperlukan upaya serius dari pemerintah dan masyarakat luas disebabkan karena masalah kabut asap sangat kompleks.

Permasalahan utama dari pengendalian kebakaran lahan dan hutan adalah pembukaan lahan dengan cara membakar yang biasa dilakukan oleh masyarakat karena biaya murah dan cepat. Dan saat ini belum dikembangkan alternatif teknologi lain yang lebih efiesien dan efektif. Selain itu kepedulian para pihak dalam penaggulangan masih kurang, bahkan para pelaku pembakaran sering kali mengancam dan menentang. Oleh karena itu perlu dilakukan penertiban dan penegakan hukum yang optimal sehingga memberikan efek jera, serta peningkatan sarana dan prasarana yang masih terbatas.

Malaysia yang menuntut agar pemerintah Indonesia segera menyelesaikan masalah ini, agar tidak terjadi masalah yang serupa pada tahun-tahun yang mendatang. Bentuk protes yang dilakukan yakni sekitar 60 anggota Partai Aksi Demokrat (DAP) Malaysia melakukan unjuk rasa didepan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Mereka memprotes ketidakmampuan Indonesia dalam memadamkan kebakaran hutan yang menyebabkan Malaysia terkena dampak kabut asap. Bentuk protesnya dengan membagikan masker kertas dan menuntut ganti rugi terhadap Pemerintah Indonesia.

Upaya serius dari Indonesia dalam menaganai masalah kabut asap ini tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan oleh kabut asap yakni kerusakan kerusakan ekosistem dan kerugian ekonomis.

Protes yang dilakukan oleh negara-negara tetangga khususnya Malaysia, karena dampak dari kabut asap telah mengahambat aktifitas, yang mengakibatkan kerugian ekonomis.Akan tetapi pengendalian kebakaran hutan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat kecil.Dan hasilnya sangat tergantung kepada para pihak yang terkait masalah kebakaran hutan. Dengan terkendaliana kebakaran hutan dan lahan, maka bencana

D. Rumusan Masalah

Dari Alasan dan Latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu :"Bagaimana kebijakan Indonesia dalam menanggapi protes Malaysia terkait kabut asap ke Malaysia akibat kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Indonesia?

E. Kerangka Pemikiran

Teori dipergunakan untuk membantu penulis dalam menentukan tujuan serta arah penelitian dan dalam memilih konsep yang tepat untuk membentuk suatu hipotesis.Teori pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai suatu hubungan sebab-akibat atau adanya suatu korelatif positif antara gejala-gejala yang diteliti dari sesuatu faktor tertentu.Untuk menjelaskan serta menganalisis permasalahan pemerintah Indonesia dalam menanggapi kritik Malaysia dalam menanggapi masalah kabut asap, Penulis akan mecoba mendeskripsikan denagan menggunakan terori yang di kemukakan oleh **David Easton.**

Pengertian atas batasan yang dikemukakan oleh David Easton menyatakan bahwa sistem politik adalah merupakan alokasi dari pada nilai-nilai, dalam mana pengalokasian dari pada nilai-nilai tadi bersifat paksaan atau dengan kewenangan

dan dengan pengalokasian yang bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat sebagai

D. Rumusan Masalah

Dari Alasan dan Latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat diarik rumusan masalah, yaitu :"Bagaimana kebijakan Indonesia dalam menanggapi protes Malaysia terkait kabut asap ke Malaysia akibat kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Indonesia?

E. Kerangka Pemikiran

Teori dipergunakan untuk membantu penulis dalam menentukan tujuan serta arah penelitian dan dalam memilih konsep yang tepat untuk membentuk suatu hipotesis.Teori pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai suatu hubungan sebab-akibat atau adanya suatu korelatif positif antara gejala-gejala yang diteliti dari sesuatu faktor tertentu.Untuk menjelaskan serta menganalisis permasalahan pemerintah Indonesia dalam menanggapi kritik Malaysia dalam menanggapi masalah kabut asap. Penulis akan mecoba mendeskripsikan denagan menggunakan teori yang di kemukakan oleh David Easton.

Pengertian atas batasan yang dikemukakan oleh David Easton menyatakan bahwa sistem politik adalah merupakan alokasi dari pada nilai-nilai, dalam mana pengalokasian dari pada nilai-nilai tadi bersifat paksaan atau dengan kewenangan

suatu keseluruhan. Lebih lanjut David Easton menyatakan pula bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai seperangkat interaksi yang di abstaraksikan dari seluruh tingkah laku sosial, melalui mana nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif (paksa) kepada masyarakat[5].

Sedangkan menurut pendapat Robert A. Dahl dalam bukunya yang berjudul modern *Political Analysis*. Sistem politik adalah sebagai pola yang tetap dari hubungan-hubungan antar manusia yang saling terlibat, dengan tingkat yang berarti, kontrol, pengaruh, ataupun wewenang[6].

Berdasarkan pada pengertian atau batasan yang di kemukakan oleh para sarjana terkemuka diatas dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa sistem politik adalah merupakan sistem interaksi atau hubungan yang terjadi dalam masyarakat, melalui mana dialokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, dan pengalokasian nila-nilai itu dengan mempergunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah. Dari pengertian sistem politik dapat ditarik 3 unsur sistem politik menurut David Easton.

---

[5] David Easton, A Framework For Poltical Analyisis, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J., 1965, hal.57.

[6] Robert A. Dahl, Modern Political Analysis, Prentice-Hall of India, Private Limited, New Dehli

suatu keseluruhan. Lebih lanjut David Easton menyatakan pula bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai seperangkat interaksi yang di abstaraksikan dari seluruh tingkah laku sosial, melalui mana nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif (paksa) kepada masyarakat[5].

Sedangkan menurut pendapat Robert A. Dahl dalam bukunya yang berjudul modern *Political Analysis*. Sistem politik adalah sebagai pola yang tetap dari hubungan-hubungan antar manusia yang saling terlibat, dengan tingkat yang berarti, kontrol, pengaruh, ataupun wewenang[6].

Berdasarkan pada pengertian atau batasan yang di kemukakan oleh para sarjana terkemuka diatas dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa sistem politik adalah merupakan sistem interaksi atau hubungan yang terjadi dalam masyarakat, melalui mana dialokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, dan pengalokasian nila-nilai itu dengan mempergunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah. Dari pengertian sistem politik dapat ditarik 3 tansur sistem politik menurut David Easton.

---

[5] David Easton. A Framework for Political Analysis, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs N. J., 1965, hal.57.

[6] Robert A. Dahl, Modern Political Analysis, Prentice-Hall of India, Private Limited, New Delhi, 1978, hal 3

Pertama, sistem interaksi, dalam sitem politik baik yang tradisional maupun modern terjadi interaksi antara aktor-ator politik dapat berwujud individu, organisasi, maupun berwujud lembaga ataupun instansi. *Kedua,* pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat, yang dimaksud dengan nilai-nilai adalah merupakan sesuatu hal yang dianggap mempunyai harga tinggi di mata masyarakat. Diantara nilai-nilai tersebut terdapat satu atau dua nilai yang mendapat penghargaan tinggi dari masyarakat, sehingga masyarakat akan berbeda dalam memberikan penghargaan terhadap suatu nilai apabila dibandingkan dengan penghargaan yang di berikan oleh masyarakat lain. Adapun nilai-nilai yang terdapat dan dibutuhkan oleh masyarakat, menurut Harold Lastwell, terdiri dari delapan nilai yaitu *power, enlightenment, wealth well-being, skill, affection, rectitude and deference*. Selain delapan nilai tadi oleh Karl. W. Dutsch yaitu ditambah dua nilai lagi yaitu *security* dan *liberty. Ketiga* paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah, pengertian atau peristilahan" sedikit banyak bersifat sah" adalah utuk meberikan gambaran bahwa paksaan fisik yang dilakukan dalam suatu sistem politik keabsahannya diragukan. Keragu-raguan terhadap keabsahan fisik ini apabila ditujukan kepada sistem politik yang totaliter akan tetapi apabila dipergunakan atu dicantumkan istilah sedikit

Pertama, sistem interaksi dalam sitem politik baik yang tradisional maupun modern terjadi interaksi antara aktor-aktor politik dapat berwujud individu, organisasi, maupun berwujud lembaga ataupun instansi. *Kedua*, pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat, yang dimaksud dengan nilai-nilai adalah merupakan sesuatu hal yang dianggap mempunyai harga tinggi di mata masyarakat. Diantara nilai-nilai tersebut terdapat satu atau dua nilai yang mendapat penghargaan tinggi dari masyarakat, sehingga masyarakat akan berbeda dalam memberikan penghargaan terhadap suatu nilai apabila dibandingkan dengan penghargaan yang di berikan oleh masyarakat lain. Adapun nilai-nilai yang terdapat dan dibutuhkan oleh masyarakat menurut Harold Lasswell terdiri dari delapan nilai yaitu *power*, *enlightenment*, *wealth*, *well-being*, *skill*, *affection*, *rectitude* dan *respect*. Selain delapan nilai tadi oleh Karl. W. Dutsch yaitu ditambah dua nilai lagi yaitu *security* dan *liberty*. *Ketiga* paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah, pengertian atau [illegible] sedikit banyak bersifat sah, adalah untuk [illegible] paksaan fisik yang dilakukan dalam suatu sistem politik keabsahannya diragukan. Keragu-raguan terhadap keabsahan fisik ini apabila ditujukan kepada sistem politik yang totaliter, atau [illegible] apabila dipergunakan [illegible] istilah sedikit

banyak bersifat sah maka segala macam jenis sistem politik baik itu totaliter maupun demokratis akan dapat tercakup didalam pengertian atau batasan diatas[7].

Untuk memahami lebih jelas tentang teori ini,penulis akan menggambarkan skema dari sistem politik yang dimaksud.[8]

Skema Teori Pembuatan Keputusan Menurut David Easton

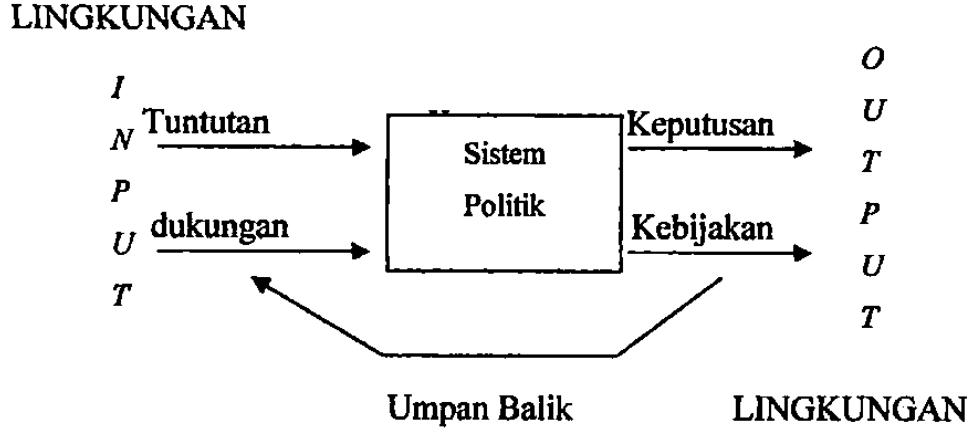

Dari skema diatas, Input terbagi dalam dua jenis yang berbeda, yaitu tuntutan dan dukungan. Tuntutan adalah keinginan dari orang-orang atau kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam menyikapi suatu permasalahan. Bila tuntutan atau kehendak-kehendak itu disalurkan dengan suatu usaha yang diorganisasikan secara khusus dalam masyarakat maka tuntutan-tuntutan itu telah menjadi input-input bagi sistem politik.

---

[7] Haryanto, Drs, Sistem Politik: Suatu Pengantar. Penerbit Liberty, Yogyakarta.1982. Hal 5

[8] Hodgson, Peter and Jones, Graham, *Refactoring Legacy Event Data for Use in a Graph Database*, 2020 Annual Computer Science and Engineering Technology Conference (ACSETC), Georgia Southern University, Statesboro, GA, April 2020, pp. 11-17.

[7] Hodgson, Peter and Jones, Graham, *Migrating Relational Data to Graph Databases*, 2020 Annual Computer Science and Engineering Technology Conference (ACSETC), Georgia Southern University, Statesboro, GA, April 2020, pp. 1-10.

[6] Hodgson, Peter and Jones, Graham, *Refactoring Legacy Event Data for Use in a Graph Database*, 2020 Annual Computer Science and Engineering Technology Conference (ACSETC), Georgia Southern University, Statesboro, GA, April 2020, pp. 11-17.

[5] Hodgson, Peter and Jones, Graham, *Migrating Relational Data to Graph Databases*, 2020 Annual Computer Science and Engineering Technology Conference (ACSETC), Georgia Southern University, Statesboro, GA, April 2020, pp. 1-10.

[4] Hodgson, Peter and Jones, Graham, *Refactoring Legacy Event Data for Use in a Graph Database*, 2020 Annual Computer Science and Engineering Technology Conference (ACSETC), Georgia Southern University, Statesboro, GA, April 2020, pp. 11-17.

[3] Hodgson, Peter and Jones, Graham, *Migrating Relational Data to Graph Databases*, 2020 Annual Computer Science and Engineering Technology Conference (ACSETC), Georgia Southern University, Statesboro, GA, April 2020, pp. 1-10.

[2] Hodgson, Peter and Jones, Graham, *Refactoring Legacy Event Data for Use in a Graph Database*, 2020 Annual Computer Science and Engineering Technology Conference (ACSETC), Georgia Southern University, Statesboro, GA, April 2020, pp. 11-17.

[1] Hodgson, Peter and Jones, Graham, *Migrating Relational Data to Graph Databases*, 2020 Annual Computer Science and Engineering Technology Conference (ACSETC), Georgia Southern University, Statesboro, GA, April 2020, pp. 1-10.

[8] Hodgson, Peter and Jones, Graham, *Refactoring Legacy Event Data for Use in a Graph Database*, 2020 Annual Computer Science and Engineering Technology Conference (ACSETC), Georgia Southern University, Statesboro, GA, April 2020, pp. 11-17.

[7] Hodgson, Peter and Jones, Graham, *Migrating Relational Data to Graph Databases*, 2020 Annual Computer Science and Engineering Technology Conference (ACSETC), Georgia Southern University, Statesboro, GA, April 2020, pp. 1-10.

Şekil 1 Graf Veritabanına Geçirilmesi Planlanan Mevcut Sistem

Şekil 1'deki örnek gibi, mevcut sistemden graf veritabanına geçiş planlanmaktadır. Bu geçiş sırasında mevcut sistemden gelen veriler, graf veritabanına uygun hale getirilmelidir. Bu çalışmada, mevcut sistemden gelen verilerin graf veritabanına uygun hale getirilmesi için kullanılan yöntemler anlatılmıştır.

Dukungan merupakan suatu energi bagi sistem politik.Input yang berupa tuntutan saja tidaklah memadai untuk keberlangsungan kerja suatu sistem politik.Tuntutan hanyalah bahan dasar yang dipakai untuk membuat produk akhir,yang disebut keputusan. Untuk tetap menjaga keberlangsungan fungsinya, sistem itu memerlukan energi dalam bentuk tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang memajukan suatu sistem politik, tuntutan-tuntutan yang timbul didalamnya, dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya. tanpa dukungan, tuntutan tidak akan bisa dipenuhi atau konflik tujuan tidak akan terselesaikan. Dukungan ini biasanya berasal dari : rezim, komunitas dan pemerintah.

Dari dukungan dan tuntutan yang merupakan input dari sistem politik akan terjadi suatu proses yang menghasilkan output. Output adalah keputusan-keputusan mengenai kebijaksanaan. Maka pemerintahan terletak tanggung jawab besar dan tinggi untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan output berupa keputusan dengan input berupa tuntutan.

Dari teori tersebut diatas ,penulis akan mencoba mengaplikasikan sebagai berikut : kasus kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap mendapat protes dari berbagai kalangan, terutama Malaysia yang terkena dampak kabut asap

Unsur-unsur sistem politik David Easton, Sistem interaksi yaitu akibat dari adanya kabut asap menimbulkan interaksi yang berlangsung didalam sistem politik antara individu yang satu dengan yang lain. Interaksi antara individu yang satu dan individu yang lain akan menimbulkan suatu kesepakatan untuk mengeluarkan suatu kebijakan. Hal ini menimbulkan interaksi antar aktor-aktor yang terlibat dalam penyelesaian masalah kabut asap.Interkasi yang berlangsung didalam sistem politik yaitu Presiden Indonesia, Menteri lingkungan Hidup, Perdana Menteri Malaysia, Menteri Lingkungan Malaysia. Interaksi antar individu dan organisasi atau lembaga yaitu Green peace, DAP yang melayangkan protes. Interaksi organisasi adalah ASEAN, DEPHUT-RI, dan dari hubungan interaksi dibuat suatu kebijakan. .

Alokasi nilai-nilai masyarakat, Interaksi aktor-aktor politik diatas memperjuangkan nilai-nilai yang menurut Harold Lasewell ada delapan. Hal ini karena permasalahan kabut asap Indonesia menyentuh nilai-nilai *wealth* (kemakmuran) dan *weel-being* (mensejahterakan) karena perekonomian rakyat menjadi terhambat. Kabut asap yang menghambat aktivitas sehingga menimbulkan keterhambatan mata pencaharian. Hal ini disebabkan karena petani-petani kecil yang sumber mata pencahariannya berasal daerah hutan. Sementara itu sumber

daya alam unggulan bangsa Indonesia yang banyak mengahsilkan devisa berasal dari hasil hutan yang merupakan komoditas ekspor. Akibat dari kebakaran hutan Indonesia mendapat kerugian secara materiil dan Immateril (kesehatan). Malaysia menganggap kabut asap yang melanda Indonesia mengakibatkan kerugian immateriil bagi malaysia. Hal ini disebabkan karena banyak aktifitas-aktifitas terutama perdagangan menjadi terganggu sehingga nilai-nilai yang dialokasikan juga sama yaitu wealth dan well-being.

Input tuntutan berasal dari Sekitar 60 anggota Partai Aksi Demokratik (DAP), yang merupakan salah satu partai oposisi di Malaysia. Protes yang dilakukan berupa unjuk rasa di depan KBRI, mereka menuntut agar Indonesia segera menyelesaikan permasalahan kebut asap karena mereka menganggap pemerintah Indonesia tidak mempu mengatasi masalah kebakaran hutan yang menyebabkan Malaysia terkena dampak kabut asap.Bentuk protesnya adalah membagikan masker kertas dan menuntut ganti rugi terhadap pemerintah Indonesia. Hampir setiap musim kemarau, perkembangan kasus ini semakin memprihatinkan .Sementara berbagai pihak menilai pemerintah terkesan santai dan tidak ambil pusing terhadap masalah ini.Padahal sebagian besar aset negara diperoleh dari sektor kehutanan yang telah memainkan peran penting dalam

pembangunan nasional yaitu sumber terbesar perolehan devisa non migas, pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja serta penggerak pembangunan.

Meningkatnya kebakaran hutan di Indonesia mendatangkan protes dari negara-negara tetangga khususnya Malaysia yang terkena dampak dari kabut asap.Malaysia merasa sangat dirugikan akibat dari kabut asap sebab perekonomian pebisnis Malaysia menjadi terhambat.

Paksaan fisik sedikit banyak bersifat sah karena nilai-nilai yang dialokasikan itu sangat penting sehingga pengalokasian nilai tersebut harus dilakukan oleh badan-badan yang berwenang seperti Presiden, DPR, Dephut, bahkan pemerintah daerah, sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang sah dan pelaksanaannya bersifat otortatif (paksa) untuk diterapkan dan dijalankan oleh masyarakat.

Dari berbagai macam desakan dan dorongan dari segala pihak,pemerintah mulai melakukan suatu proses politik yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah kebijakan dan keputusan yang dapat segera diberlakukan untuk menangani masalah ini yang dapat diberlakukan didalam maupun luar negeri keputusan ini merupakan suatu output yng diharapkan dapat membawa pada kondisi yang lebih baik bagi

Kebijakan yang diambil dalam penaggulangan kebakaran hutan adalah Peraturan perundangan Pemerintah Indonesia tentang UU pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi.harus ada larangan pembakaran hutan yang menyebabkan kabut asap yang signifikan, seperti pembakaran lahan gambut, meskipun penggunaan api dalam situasi dan lokasi yang mungkin menimbulkan efek lokal yang tidak diinginkan dari asap, misalnya terhadap kesehatan dan transportasi, harus diatur dalam hal kebakaran hutan yang mengakibatkan deforestasi yang tidak diinginkan pihak yang berwenang harus diberi kekuasaan untuk mengatur (termasuk melarang) penggunaan api pada waktu-waktu tertentu.

Penyebab utama terjadinya kebakaran hutan yakni sistem perladangan tradisional dari penduduk setempat yang berpindah-pindah, dan pembukaan hutan oleh para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk industri kayu maupun perkebunan kelapa sawit.Dan hasil penelitian *Center for International Forestry Research* atau Lembaga Penelitian Kehutanan Internasional, bahwa secara structural penyebab kebakaran hutan tropis adalah kombinasi kemiskinan, kebijakan pembangunan, dan tata pemerintahan.

Penyebab srtuktural inilah yang sering kali melahirkan konflik antara pemilik modal industri perkayuan maupun pertambangan dengan penduduk asli

yang merasa kepemilikan tradisional mereka atas lahan, hutan dan tanah dikuasai oleh para inverstor yang diberi pengesahan melaui hukum positif negara. Akibatnya kekesalan masyarakat dilampiaskan dengan melakukan pembakaran (arson) demi mempertahankan lahan yang telah mereka mliki secara turun temurun. Hal ini dilakukan masyarakat tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan akibat dari pemabakaran hutan tersebut. Hampir pada setiap kasus kebakaran hutan, pemerintah pusat dan daerah selalu menayalahkan penduduk asli yang melakukan perladangan berpindah, atau melakukan pembakaran. Padahal salah satu penyebab dari kebakaran hutan adalah kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan kelestarian sumber daya yang ada.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam kasus kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap hingga ke negara-negara tetangga ini dapat diatasi dan dicegah secepat mungkin agar tidak mendapat protes lagi dari negara-negara yang terkena dampak dari kabut asap ini.

Harapan yang paling mendasar dari semua upaya yang dilakukan adalah agar pemerintah Indonesia dapat mengatasi pratik kebakaran hutan yang dapat

F . Hipotesis

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggapi protes Malaysia terkait masalah kabut asap

1. Pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan yang bersifat internal, yaitu dengan membuat peraturan tentang pengelolaan hutan dan lahan.
2. Indonesia mengadakan perundingan bilateral dengan Malaysia dan melakukan hubungan multirateral dengan negara ASEAN dalam menangani masalah kabut asap

F. Jangkauan Penelitian

Untuk lebih memfokuskan dan memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian tentang kabut asap lintas batas Indonesia penulis akan melakukan pembatasan penelitian mulai dari tahun 2004 sampai akhir tahun 2006. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan penulis akan menggunakan data-data di luar rentang waktu tersebut, asal berkaitan dan masih cukup relevan untuk digunakan dalam

F. Hipotesis

Kehijakan pemerintah Indonesia dalam menanggapi protes Malaysia terkait masalah kabut asap

1. Pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan yang berasal internal, yaitu dengan membuat peraturan tentang pengelolaan hutan dan lahan.
2. Indonesia mengadakan perundingan bilateral dengan Malaysia dan melakukan hubungan multilateral dengan negara [illegible] menangani masalah kabut asap

F. Jangkauan Penelitian

Untuk lebih memudahkan dan memudahkan penelitian untuk melakukan penelitian [illegible] penelitian [illegible] 2001 sampai akhir tahun 2006. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis akan menyuguhkan data-data di lain rentang waktu tersebut, asal berkaitan dan masih cakap relevan untuk digunakan dalam [illegible]

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian sekunder yaitu mengumpulkan data-data dari internet, studi pustaka, studi literatur, koran, jurnal yang relevan dan dapat digunakan untuk menyusun penelitian penulis.

H. Sistematika Penulisan

Bab I. Bab Pendahuluan. Berisi tentang Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kasus Kebakara Hutan di Indonesia

Bab III Pembuatan Kebijakan untuk Penanggulangan Kabut Asap oleh Pemerintah Indonesia

Bab IV Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggani Masalah Kabut

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian sekunder yaitu mengumpulkan data-data dari internet, studi pustaka, studi literatur, karena lamat yang telah dan dapat digunakan untuk menyusun penelitian penulis.

H. Sistematika Penulisan

Bab I. Bab Pendahuluan. Berisi tentang Alasan Pemilihan Judul Lujuan Penulisan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Hipotesa, Jangkauan Penentian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia

Bab III Pemuatan Kebijakan untuk Penanggulangan Kabut Asap oleh Pemerintah Indonesia

Bab IV Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Masalah Kabut Asap

Bab V Akan berisi dan Kesimpulan dari skripsi